

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Untuk membuka dan menggambarkan skripsi ini, pada bab ini penulis akan menjelaskan berbagai informasi yang bersifat mendasar, yang nantinya diharapkan dapat membantu dalam menyelesaikan dan memahami proses penulisan skripsi. Penjelasan informasi dasar akan dimulai dengan penjelasan latar belakang masalah dari Fenomena Debt-trap yang terjadi di Sri Lanka, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dari dibuatnya skripsi ini. Dalam upaya untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis tentunya akan menggunakan suatu kerangka pemikiran sebagai alat untuk menjawab, serta akan mencantumkan argument penelitian atau hipotesa yang dimiliki oleh penulis. Selanjutnya, penelitian ini akan penulis tutup dengan penyampaian metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan. Penulis berharap, bahwa bab ini dapat digunakan sebagai gambaran yang jelas bagi penulis dan pembaca dalam memahami keseluruhan skripsi ini nantinya.

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Skripsi ini akan membahas tentang mengapa fenomena debt-trap bisa terjadi di Sri Lanka. Sri Lanka atau yang memiliki nama resmi Democratic Socialist Republic of Sri Lanka merupakan sebuah negara yang terletak di Kawasan Asia Selatan. Negara ini sebelumnya dipanggil dengan nama Ceylon sampai pada sekitar tahun 1972, sebelum akhirnya berubah menggunakan nama yang kita kenal sekarang. Negara kepulauan ini terletak pada Samudera Hindia, yang berbatasan langsung pada teluk bengala di sebelah barat daya, dan laut arab pada sisi tenggara. Sri Lanka memiliki dua kota utama, yakni Kota Sri Jayawardenepura Kotte sebagai ibu kota negara, dan

Colombo sebagai pusat bisnis dan perekonomian (Roberts & Kanaley, 2006).

Sejak era lampau, Sri Lanka dikatakan memiliki lokasi yang sangat strategis bagi jalur perdagangan dunia, khususnya jalur perdagangan yang melalui rute Samudera Hindia dengan tujuan Asia Timur ataupun Asia Tenggara. Oleh karenanya, sejak masa lampau Sri Lanka dijadikan kawasan yang sangat penting karena berada di jalur sutera maritime bagi pedagang yang berasal dari China dan Eropa. Sri Lanka dijadikan sebagai pemberhentian penting kapal-kapal perdagangan dunia, dan dijadikan sebagai pusat penjualan atau *trading hub* bagi komoditas seperti rempah-rempah, sutera, dan berbagai macam komoditas khas masyarakat Asia Selatan lainnya (Bandaranayake, 1990).

Meskipun memiliki lokasi yang sangat strategis bagi jalur perdagangan dunia, tidak dapat dipungkiri Sri Lanka banyak memiliki permasalahan finansial atau keuangan. Banyak faktor yang melatar belakangi hal ini, tetapi pada intinya permasalahan keuangan ini menyebabkan Sri Lanka kesulitan dalam melakukan pembangunan infrastruktur dalam negerinya. Sebagai sebuah negara berkembang, Sri Lanka tidak dapat melakukan pembangunan infrastruktur dan ekonomi dalam negerinya seorang diri atau menggunakan dana yang berasal dari kas negara-nya sendiri, melainkan Sri Lanka seringkali harus dan bahkan membutuhkan bantuan utang luar negeri dari suatu instansi keuangan seperti IMF ataupun World Bank, dan bantuan pinjaman dari negara lain demi membangun infrastruktur dalam negerinya (Pannell, 2011).

Berbicara mengenai utang luar negeri, Sri Lanka merupakan salah satu negara yang banyak menggunakan utang luar negeri demi melakukan pembangunan infrastruktur dalam negerinya. Yang

mana dari tahun ketahun, utang ini terus bertambah dan menyebabkan Sri Lanka sedikit demikit kesulitan untuk melunasinya. Pada tahun 2020, Sri Lanka mencatatkan nilai utang sebesar lebih dari US\$ 51.6 biliun. Data utang yang dimiliki Sri Lanka mencapai puncak tertinggi pada 2019, yang sempat menyentuh angkat US\$ 55.9 bn, dan angkat terendah pada tahun 2012 yang US\$ 37.1 bn. Nilai ini mengalami fluktuatif namun tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan (CEIC DATA, 2020).

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari CEIC Flex dan Trading Economics Centre, sejak tahun 2014-2020 Sri Lanka memiliki rata-rata rasio utang sebesar 79% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Nilai ini bahkan terus meningkat sampai akhir tahun 2020, yang mana rasio utang Sri Lanka menembus angka 98% dari PDB (CEIC DATA, 2020).

Melihat rasio utang terhadap PDB yang sangat tinggi tentu bukanlah hal yang baik bagi sebuah negara, khususnya bagi negara yang sedang berkembang seperti Sri Lanka. Hal ini dikarenakan, rasio utang yang semakin tinggi akan membuat sebuah negara kesulitan untuk melunasi atau bahkan mengalami kegagalan dalam proses mencicil nilai utangnya, dan menyebabkan sebuah negara jatuh dalam suatu kepanikan ekonomi baik secara domestic maupun internasional. Berdasarkan pada studi yang dilakukan oleh World Bank, rasio normal utang luar negeri terhadap PDB yang aman bagi suatu negara adalah dibawah 64%, dan jika suatu negara memiliki rasio utang luar negeri terhadap PDB yang melebihi 77% dari PDB dalam jangka waktu yang panjang akan berdampak buruk pada pertumbuhan sistem dan roda perekonomian negara tersebut (CERDASCO, 2019).

Melihat penjelasan diatas, Sri Lanka tentunya berada diambang yang dalam tanda kutip dikatakan 'sangat tidak aman', mengingat rasio utang luar negeri

terhadap PDB Sri Lanka yang menyentuh angka rata-rata sebesar 79%, dan bahkan sempat menyentuh angka 98% pada akhir tahun 2020. Hal inilah yang menyebabkan banyak analisis dari pakar ekonomi yang mengatakan bahwa Sri Lanka sedang sangat kesulitan dalam membayar utang luar negerinya, dan berpotensi untuk mengalami kegagalan dalam pembayaran utang dan bahkan berpotensi untuk dalam tanda kutip ‘dimanfaatkan’, oleh negara pemberi utang. Pemanfaatan yang dilakukan oleh ‘si pemberi utang’ inilah yang menyebabkan Sri Lanka dikatakan jatuh kedalam suatu Fenomena Debt-Trap atau Jebakan Utang.

Mulai merebaknya berita perihal terjadinya Fenomena Debt-Trap di Sri Lanka dimulai sejak adanya berita pengambilan alih Pelabuhan Hambatonta oleh Pemerintah China pada tahun 2017 silam. Diambil alihnya salah satu proyek Pelabuhan Strategis milik Pemerintah Sri Lanka ini dikarenakan Pemerintah Sri Lanka mengalami deficit keuangan yang menyebabkan mereka kesulitan dalam membayar utang kepada Pemerintah China. Pelabuhan ini dibangun dengan menggolontorkan dana kurang lebih sebesar US\$ 361 Juta, dan sekitar 85% dana pembangunannya menggunakan pinjaman luar negeri China, yang didapat melalui EXIM Bank of The People’s Republic of China dan menggunakan kontraktor China Harbour Engineering & Co yang juga berasal dari China. Ketika pembangunannya selesai, Hambatonta Airport digaungkan akan menjadi salah satu pelabuhan terbesar yang menghubungkan antara Asia Barat dan Eropa. Melihat potensi yang bisa dikatakan besar ini, seolah membuat Pemerintah Sri Lanka tutup mata dan berani untuk melakukan utang dengan jumlah yang besar, demi merealisasikan proyek pelabuhan ini (Sirimane, 2010).

Keberanian Pemerintah Sri Lanka dalam mengambil utang dengan jumlah besar ini didasarkan pada harapan bahwa Pelabuhan Hambatonta akan menjadi jalur pemberhentian strategis bagi dunia ekonomi, khususnya bagi kapal-kapal yang berlayar dari Eropa-Asia maupun sebaliknya. Namun pada kenyataannya, pada tahun 2016 Pelabuhan Hambatonta hanya berhasil menghasilkan laba US\$ 1,81 Juta. Hal ini tentu membuat operasional pelabuhan menjadi terhambat, terlebih lagi keuntungan yang kecil membuat Sri Lanka kesulitan dalam mengembalikan pinjaman luar negerinya kepada China (Brautigam, 2020).

Kesulitan ini membuat Sri Lanka harus melakukan negosiasi kepada Pemerintah tentang bagaimana cara meringankan beban utang Sri Lanka kepada Pemerintah China. Pada tahun 2017, Negosiasi ini memberikan hasil kesepakatan bahwa China akan membeli sebesar 85% saham dari Pelabuhan Hambatonta sebesar US\$ 1,1 Miliar, dan mendapatkan hak kelola dominan atas Pelabuhan Hambatonta dalam kurun waktu 99 tahun. Hak kelola ini akan diterima China melalui China Merchants Port Holdings Company Limited (CMPHCL) (Fasisaka, 2019).

Dugaan dari jatuhnya Sri Lanka kedalam suatu perangkap jebakan utang bukan hanya didasarkan pada kasus yang terjadi di Pelabuhan Hambatonta semata, melainkan ada satu proyek lagi yang dikatakan telah membuat Sri Lanka jatuh pada suatu perangkap jebakan utang, yakni kasus yang terjadi pada proyek Bandara Mattala. Kasus pada Bandara Mattala tentunya seolah membuat dugaan bahwa Sri Lanka sudah masuk kedalam sebuah fenomena jebakan utang menjadi semakin kuat. Bandara cukup megah yang diproyeksikan sebagai bentuk pembangunan dan kepedulian Pemerintah Sri Lanka kepada masyarakatnya pada akhirnya masuk ke-jurang kerugian. Pembangunan dengan menggunakan biaya

yang cukup besar, yakni kurang lebih sebesar US\$ 209 juta ternyata gagal memenuhi ekspektasi. Terlebih lagi, pembangunan Bandara ini memiliki mekanisme pembiayaan yang 90%-nya didapat dari Pemerintah China. Saat ini Pemerintah Sri Lanka pada akhirnya sudah memberikan hak eksklusif kepada Pemerintah China untuk melakukan pengelolaan terhadap Bandara Mattala, yang mana pengelolaan ini akan dilakukan oleh Pemerintah China melalui perusahaan teknologi dalam negerinya bernama IZP Group (Adam, 2017).

Melihat semakin maraknya pemberitaan terkait tentang adanya fenomena jebakan utang yang terjadi di Sri Lanka, disini penulis berusaha untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam terkait dengan alasan dibalik terjadinya fenomena jebakan utang yang terjadi di Sri Lanka.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Mengapa Fenomena *Debt-Trap* bisa terjadi di Sri Lanka?

## **C. KERANGKA TEORI**

### **a. Teori Depedensi (Ketergantungan)**

Teori Depedensi atau yang dalam Bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai teori ketergantungan merupakan teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut pandang negara berkembang (negara dunia ketiga), teori ini hadir sebagai kritik dari adanya Teori Modernisasi yang sudah lebih dulu berkembang pasca perang dunia ke-II (Murodi & Nilamsari, 2007). Teori dependensi mulai dikembangkan pada tahun 60-an, tepatnya ketika para akademisi berupaya untuk mencari tahu penyebab keterbelakangan

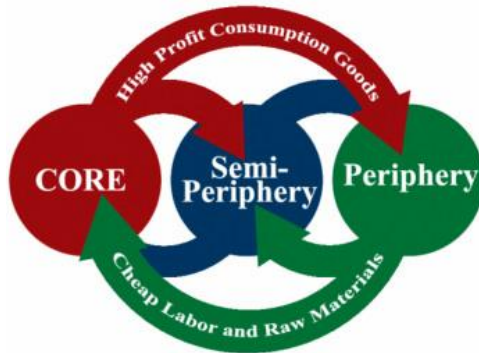
pembangunan, baik dari sisi ekonomi, industry, maupun kestabilan politik di kawasan Amerika Latin (Ahiakpor & C.W, 1985).

Pemikiran ini pertama kali dikemukakan oleh Raul Presbich, yang merupakan Direktur dari Economic Commission of America Latin (ECLA), beliau memiliki keresahan bahwa perekonomian di negara-negara maju berkembang dengan sangat pesat, tetapi perkembangan perekonomian di negara maju ini tidak serta merta dapat menarik negara-negara miskin untuk memiliki perkembangan ekonomi yang sama. bahkan, Raul Presbich mengatakan bahwa kegiatan atau perkembangan ekonomi yang terjadi di negara-negara kaya kerap kali membawa permasalahan pada negara-negara miskin (Suwasono, 2000).

Jika dipandang dari sudut pandang teori politik alternatif, teori dependensi atau teori ketergantungan merupakan tatanan konsep yang digunakan oleh ilmuwan politik untuk melihat dan menganalisis kemajuan pembangunan yang terjadi di negara berkembang, baik secara ekonomi maupun dari sisi negara tempat mereka bergantung (*depend to*). Teori ini berpendapat bahwa negara berkembang dalam proses meningkatkan kemajuan ekonomi, infrastruktur, dan berbagai macam hal yang bersifat pembangunan/modernisasi dalam negeri harus bergantung atau bersandar terhadap negara maju (Lazuardy, 2020).

Seperti yang tertera pada gambar dibawah, Gunder Frank mengatakan bahwa keterbelakangan yang terjadi pada negara-negara dunia ketiga bukanlah sesuatu yang

terjadi secara natural atau alami. Frank berpendapat bahwa keterbelakangan ini terjadi karena sebuah proses yang terjadi selama bertahun-tahun lamanya. Frank menjelaskan ini melalui konsep kapitalisme yang mengungkapkan bahwa keberadaan negara Core (maju) cenderung akan merugikan negara Periphery (Berkembang), karena mereka akan berusaha untuk terus menyedot sumber daya yang dimiliki oleh negara Periphery, baik itu yang bersifat sumber daya alam maupun sumber daya manusia (Frank, 1969).



Gambar 1 : Teori Dependensi

Selanjutnya teori ini dikembangkan oleh Theotonia Dos Santos, yang mana menurut Dos Santos (1970), dikutip pada buku Jorge Larrain yang berjudul *Theories of Development*, Dependensi atau ketergantungan dapat kita artikan sebagai sebuah kondisi yang menggambarkan keadaan perekonomian negara berkembang terkondisikan atau dipengaruhi oleh ekspansi ekonomi yang bersifat eksternal. Dalam konteks teori dependensi, ekspansi eksternal yang dimaksud ialah ekspansi yang dilakukan



oleh negara-negara maju, yang nantinya akan menjadi tempat bergantung bagi si-negara berkembang. Ekspansi ini tentunya tidak selalu memperoleh dampak yang baik, karena negara yang akhirnya bergantung secara ekonomi kepada negara lain cenderung tidak dapat memperoleh kestabilan kondisi perekonomian dalam negeri-nya dengan baik (Larrain, 1989).

Selanjutnya, Dos Santos juga membagi jenis ketergantungan menjadi beberapa bagian, pembagian ini didasarkan pada asumsi dan pemikiran mengenai terjadinya suatu ketergantungan dikaitkan pada berbagai macam aspek dan perspektif yang mempengaruhinya. Peembagian jenis ketergantungan tersebut ialah (Dos Santos, 1970):

1. Ketergantungan Finansial,

Inti dari adanya ketergantungan finansial adalah, suatu negara merdeka atau dinyatakan merdeka. Namun, pada praktik pelaksanaannya negara ini masih harus bergantung dengan negara lain dalam hal finansial, atau yang dalam konteks ini bisa kita katakan bahwa negara 'periphery' yang secara finansial belum memiliki kemampuan yang baik, harus bergantung secara finansial kepada negara 'core', demi menjalankan roda perekonomian dalam negerinya.

Ketergantungan pada sumber daya finansial ini menyebabkan negara 'periphery' dikuasai oleh kekuatan finansial dari negara 'core'. Bentuk penguasaan ini perlahan dapat berubah

bentuk menjadi penguasaan terhadap sektor perekonomian, yang mana negara 'periphery' dapat mengalami kerugian karena berbagai macam sumber daya ekonominya dapat dikendalikan secara penuh oleh negara 'core'.

## 2. Ketergantungan Teknologi-Industrial,

Ketergantungan teknologi-industrial merupakan bentuk ketergantungan yang bisa dikatakan baru. Kurang lebih memiliki konsep yang sama dengan ketergantungan finansial, ketergantungan teknologi-industrial berawal dari asumsi bahwa negara 'periphery' belum memiliki kemampuan dan kecakapan yang baik dalam bidang teknologi-industrial. Kurangnya kecakapan ini tentu membuat negara 'periphery' harus meminta bantuan dari negara 'core' atau bahkan perusahaan multinasional demi melakukan pembangunan dan pengembangan teknologi industrial dalam negerinya.

Ketergantungan ini dilakukan dalam bentuk yang lebih modern, dimana biasanya negara 'core' atau negara pusat berperan dalam mengurus izin dari perusahaan multinasionalnya dan selanjutnya akan melakukan penanaman modal dengan dalih investasi di-negara 'periphery' melalui perusahaan tersebut.

Dalam kasus yang terjadi di Sri Lanka, penulis berusaha menggambarkan Fenomena Debt-Trap yang terjadi sebagai berikut:

1. Sri Lanka sebagai negara peminjam dikategorikan sebagai negara 'Periphery',
2. China sebagai negara pemberi utang dikategorikan sebagai negara 'Core'.

Sri Lanka sebagai negara periphery yang kesulitan dalam melakukan pembangunan infrastruktur dalam negerinya karena kurangnya sumber daya finansial, harus melakukan pengambilan utang luar negeri kepada Pemerintah China. Terlebih lagi, pemberian kemudahan komulatif yang diberikan pemerintah menyebabkan Sri Lanka terus menambah utang luar negerinya, dan hal inilah yang menyebabkan Sri Lanka bergantung kepada China secara finansial.

Pemberian utang ini juga diiringi dengan penanaman modal, yang mana China melalui berbagai macam perusahaan multinasionalnya, baik yang bergerak di-bidang perbankan maupun tekhnologi pembangunan melakukan penguasaan terhadap sektor-sektor penting, yang dibangun menggunakan utang luar negeri-nya. Perusahaan China yang terlibat seperti EXIM Bank of The People's Republic of China sebagai pemberi modal, China Harbour Engineering & Co sebagai kontraktor pembangunan. Selain itu, juga terdapat perusahaan tekhnologi lainnya yang berperan dalam melakukan pengelolaan terhadap sektor ekonomi-infrastruktur yang sudah dikuasai seperti China Merchants Port Holdings Company Limited (CMPHCL) dalam

pengelolaan Pelabuhan Hambatontan dan IZP Group dalam pengelolaan Bandara Mattala. Melihat hal ini, secara tidak langsung kita bisa mengatakan bahwa Sri Lanka sudah mengalami ketergantungan teknologi-industrial terhadap China, khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, penulis menganggap bahwa teori ini cocok untuk menggambarkan situasi yang terjadi di Asia Selatan, dimana negara-negara berkembang seperti Sri Lanka harus bergantung dengan negara lain demi melakukan pembangunan di-dalam negerinya masing-masing, yang mana dalam konteks ini, ketergantungan yang terjadi ialah ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Jika dilihat dari konteks rasio pinjaman luar negeri dari sebuah negara, China merupakan negara pemberi utang terbesar di Kawasan Asia Selatan, pada akhir tahun 2019 presentase nilai utang negara-negara di kawasan Asia Selatan menyentuh lebih dari 49% berasal dari China, dengan nilai utang senilai ribuan triliun rupiah (Bolanos-Misas & Pollock, 2020).

Ketergantungan akan utang inilah yang nantinya akan membuat sebuah negara jatuh kedalam situasi 'Debt-trap', dimana negara-negara yang gagal dalam membayar utang akan memberikan sumber daya yang dimilikinya kepada si pemberi utang. Contoh yang terjadi ialah Kegagalan Sri Lanka dalam membayar utang kepada China menyebabkan Sri Lanka harus memberikan hak Kelola atas Hambatonta Port, Bandar Udara Mattala dan lebih dari 6.000 Ha lahan kepada China dalam jangka waktu 99 tahun (Chellaney, 2020).

#### **D. HIPOTESA**

Berdasarkan pada uraian dan penjelasan pada latar belakang, rumusan masalah dan kerangka berpikir, maka penulis mengambil hipotesis seperti berikut, Fenomena Debt-Trap terjadi di Sri Lanka karena, Sri Lanka mengalami ketergantungan secara finansial dan teknologi industrial terhadap China dalam bentuk perjanjian investasi dan pinjaman utang luar negeri. Ketergantungan inilah yang membuat Sri Lanka kesulitan dalam melakukan pembayaran utang luar negeri-nya, dan masuk kedalam situasi 'Debt-Trap, yang mana Sri Lanka harus memberikan sumber daya-infrastruktur yang dimilikinya, ketika gagal dalam melakukan pembayaran utang.

#### **E. METODE PENELITIAN**

##### **a. Metode Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode *qualitative* yang berfokus pada Teknik *library research* atau Teknik kepustakaan. Data yang digunakan merupakan data valid yang berasal dari data sekunder, dan berasal dari sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, surat kabar, dan sumber cetak lainnya. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber data internet seperti, tagar, situs atau website resmi, serta sumber-sumber internet lainnya yang merupakan data kredibel yang dapat menunjang proses penelitian yang dilakukan penulis.

b. Metode Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis data yang bersifat induktif. Dimana penulis akan berusaha terlebih dahulu untuk memahami fakta yang berkaitan dengan objek Analisa. Selanjutnya, fakta ini akan diubah menjadi generalisasi empiris, dan akan dilakukan perumusan masalah, preposisi, dan diubah menjadi sebuah naskah tulisan yang baik dan mudah dimengerti.

**F. JANGKAUAN PENELITIAN**

Agar tidak memiliki pembahasan yang melebar dari judul dan terfokus pada inti permasalahan sehingga penelitian dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Penulis menetapkan batasan tulisan hanya pada negara Sri Lanka saja, sehingga nantinya topik yang akan dibahas dalam skripsi ini hanya berfokus pada Fenomena Debt-trap yang terjadi di Sri Lanka., sejak tahun 2013-2020.

**G. SISTEMATIKA PENULISAN**

**BAB I: PENDAHULUAN**

Pada BAB I, peneliti akan menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Landasan Teori, Hipotesa, Metodologi Penelitian, Batasan Penelitian, dan Sistematika Penulisan

**BAB II: ISI/PEMBAHASAN**

- a. Membahas tentang Fenomena Debt-Trap: Pengertian, dan Sejarah,
- b. Membahas tentang Hubungan Ekonomi-Politik Sri Lanka dan China,
- c. Membahas tentang analisis ketergantungan Sri Lanka atas utang luar negeri, yang

menyebabkan Sri Lanka jatuh kedalam suatu  
Fenomena Jebakan Utang.

### **BAB III: KESIMPULAN**

Akan berisi tentang penutup dan kesimpulan